

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

by Rizal A. Hidayat

Submission date: 25-May-2023 09:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2101290091

File name: Strategi_Diplomasi_Ekonomi_Indonesia....pdf (209.14K)

Word count: 4662

Character count: 32157

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN:

Oleh:
Rizal A.Hidayat³⁷
(rizal.aditya@uai.ac.id)

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan memberikan sebuah gambaran eksplorasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang berangkat dari fenomena pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penggunaan Strategi diplomasi ekonomi ini terkait dengan rumusan masalah yang diajukan penulis yaitu Strategi apa yang diperlukan bagi diplomasi Ekonomi Indonesia dalam implementasi MEA? Pada intinya kepentingan implementasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam MEA tersebut merupakan *starting point of departure* menuju penguatan *positioning* ekonomi politik Indonesia nantinya di kawasan Asia Pasifik. Penggunaan strategi diplomasi ekonomi ini dilandasi oleh pemikiran dari teori *Open Self-Reliant Regionalism* yang dikemukakan oleh Chong Li Choy. Dengan demikian pada akhirnya akan menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari regionalism (*regionalism*) Asia Tenggara yang tetap berusaha sebagai actor tunggal untuk memenuhi kemandirian negara-bangsa terkait kebutuhan domestiknya sendiri (*self-reliance*), dengan meminimalisir ketergantungannya dengan dengan negara-negara lain. Namun tetap menjalin keterbukaan (*openness*) akan berbagai kerjasama ekonomi terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral. Terutama dalam merealisasikan lima pilar Indonesia sebagai negara-bangsamaritim. Berdasarkan landasan pemikiran *Open Self-Reliant Regionalism* inilah, maka strategi diplomasi ekonomi yang dimaksud oleh penulis dinamakan sebagai *Parallel-Complementing Diplomacy*.

Kata Kunci:

Regionalism, self-reliance, openness, parallel-complementing diplomacy

³⁷ Penulis adalah Kandidat Doktor Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.

Pendahuluan

Masyarakat ¹⁹Ekonomi ASEAN (MEA)³⁸ atau *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan bagian dari tiga pilar Masyarakat ASEAN 2020 yang dikukuhkan eksistensinya dalam *Bali Concord II* tahun 2003. Kedua pilar masyarakat ASEAN yang lain adalah: ²⁵APSC (*ASEAN Political-Security Community*) dan *ASCC* (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Namun melalui KTT ASEAN ke-12 di Filipina, akselerasi *ASEAN Community* tersebut dipercepat implementasinya menjadi tahun 2015.

Sejalan dengan percepatan implementasi *ASEAN Community* menjadi tahun 2015, akselerasi Indonesia sebagai bagian dari eksistensi Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya tidak dapat dilepaskan dari visi Indonesia dalam rangka mencapai *positioning* geostrategis-nya, yaitu sebagai negara maritim. Melalui KTT *East ASEAN Summit* (EAS), Presiden Joko Widodo telah memaparkan lima visi yang menjadi pilar pembangunan kemaritiman Indonesia. Kelima pilar yang dimaksud mencakup³⁹:

- ⁶Pilar pertama adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- Pilar kedua adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

³⁸Untuk penulisan berikutnya akan menggunakan MEA.

1.1 ²⁶Metrotvnews, "Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia", dalam <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia>, diunduh pada 15 Oktober 2015.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

- Pilar ² ketiga adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep seaport*), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Pilar keempat yang tak kalah penting dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
- Pilar kelima, ujar Jokowi, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Presiden Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.

Dengan demikian penyampaian visi sebagai negara maritim tersebut di atas pada hakekatnya merupakan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan *output* berupa menjadi pusat suatu masyarakat yang berbangsa, berkepribadian dan bernegara maritim. Berbangsa maritim, berkepribadian maritim dan bernegara maritim dalam pusaran arus globalisasi perekonomian dan perdagangan dunia. Hal ini mengingatkan kita kembali kepada pemikiran salah satu *Founding Father* Indonesia, yaitu Ir. Sukarno yaitu berusaha mewujudkan Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat secara politik, bermandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Dalam terminologi menjadi negara maritim dunia, pemikiran Ir. Sukarno tersebut mengimplikasikan tujuan utama Indonesia sebagai suatu negara-bangsa berporos maritim, yaitu ¹⁷ mewujudkan Indonesia sebagai: negara yang berdaulat secara politik sebagai negara-

PROSIDING KONVENASAH IIVI

bangsa maritim, bermandiri secara ekonomi sebagai negara-bangsa maritim, dan tentunya sebagai negara-bangsa yang berkebudayaan dengan berbasis pada budaya maritim.

MEA dan Indonesia dalam konteks negara-bangsa maritim merupakan dua wajah berbeda dalam satu peran global Indonesia dalam perubahan percaturan geostrategis dunia yang meliputi kepentingan geopolitik dan geoekonomi. Hal ini terjadi semenjak ASEAN mendeklarasikan AFTA 1992, kemudian mewujudkan dirinya ke dalam wilayah perdagangan bebas Asia Tenggara melalui ²⁶ ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area). Oleh karena itu kepentingan geostrategis Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran ASEAN sebagai *Southeast Asia open regionalism actor*.

Oleh karena itu pembentukan AFTA 1992 menunjukkan bahwa ASEAN merupakan suatu regionalisme terbuka. Walaupun dibentuk dalam rangka mengakomodasikan kepentingan internal anggotanya untuk menjadi *one community*, namun peran globalnya sebagai bagian dari komunitas dunia tetap menjadi perhatian utama ASEAN. Hal ini dengan demikian semakin menunjukkan kapabilitas dan kompetensi ASEAN mewakili region yang selalu menjadi *global-crossed entry point* pertemuan kepentingan ekonomi, politik dan sosial budaya dari berbagai kawasan lain. Di samping itu juga berfungsi sebagai region penyeimbang kekuasaan

PROSIDING KONVENASAH IIVI

para *major states actor* yang ikut mewarnai kehidupan di kawasan yang paling dinamis di Asia Pasifik ini⁴⁰.

Asia Tenggara sebagai *global-crossed entry point* memberikan implikasi terhadap *critical points* yang dihadapi Indonesia dalam konteks MEA ini. Dua *critical points* yang merepresentasikan generalisasi realisasi MEA dengan tujuan kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara yang berangkat dari efek kepentingan pertimbangan geostrategis yang mewarnai perjalanan MEA, yaitu:

1. Kepentingan politik keamanan AS dan Tiongkok yang mempengaruhi pemetaan arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara.
2. Pemetaan arsitektur ekonomi regional yang mewacanakan kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada eksistensi ACFTA, RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), TPP (*Trans Pacific Partnership*) dan IORA (*Indian Ocean Rim Association*).

Dalam rangka implikasi pertimbangan geostrategis berdasarkan kedua *critical points* tersebut di atas, maka diperlukan sebuah strategi diplomasi ekonomi yang bersifat paralel. Suatu diplomasi ekonomi Indonesia yang sejalan dengan visi *world class maritime nation-state* yang mampu mengakomodir dua kepentingan implikasi geostrategis tersebut di atas. Dan tentunya harus dilakukan Indonesia agar *survive* sebagai negara-bangsa maritim dalam percaturan ekonomi politik Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Penulis memberi nama strategi diplomasi ekonomi

⁴⁰ Rizal A. Hidayat, "Parallel-Complementing Diplomacy Sebagai Strategi Politik Keamanan ASEAN Dalam ASEAN Political-Security (APSC) 2015", *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Al Azhar*, Vol.V, No.1, Juni 2014, hlm. 1.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

paralel tersebut sebagai *Parallel Complementing-Diplomacy Strategy*(PCDS).⁴¹ Dalam konteks *ASEAN Political Security Community* (APSC), strategi ini berfungsi untuk memperkuat CBM (*Confidence Building Measure*) yang bertujuan mencapai PD (*Preventive Diplomacy*) melalui jalur ARF (*ASEAN Regional Forum*) dan ADMM (*ASEAN Defence Ministerial Meeting*).

Parallel-Complementing Diplomacy Strategy

PCDS merupakan strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan secara paralel, mencakup diplomasi bilateral dalam konteks regional dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral yang dimaksud terkait dengan relasi Indonesia dengan negara-negara intra-ASEAN dan ekstra-regional terhadap negara-negara mitra dialog utama ASEAN. Sedangkan diplomasi multilateral mencakup Indonesia sebagai bagian dari Asosiasi negara region Asia Tenggara yang berelasi ekstra-regional (ASEAN terhadap negara/kelompok negara di luar region Asia Tenggara). Esensi PCDS pada hakekatnya merefleksikan fokus pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 2014-2019.²⁴

Fokus pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 2014-2019 yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan meningkatkan ekonomi Indonesia, serta peran Indonesia di kawasan dan dunia.³¹ Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa pilar ekonomi salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia untuk menopang kemandirian ekonomi nasional. Isu yang diangkat dalam diplomasi antara lain perluasan akses pasar produk Indonesia serta promosi investasi dan pariwisata melalui peningkatan hubungan bilateral, regional dan multilateral.⁴²

⁴¹ Penulisan berikutnya akan menggunakan PCDS.

⁴² Kompas, 15 Oktober 2015

PROSIDING KONVENASAH IIVI

Dasar pemikiran penggunaan PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi Indonesia sebenarnya mengakomodir kepentingan implikasi politik keamanan AS dan Tiongkok, disamping pemetaan arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara. PCDS mengandung relevansi pemikiran Chong Li Choy tentang *Open Self Reliant Regionalism (OSRR)*⁴³. OSRR mengandung tiga refleksi konseptual yang berangkat dari tiga ide mendasar yaitu:⁴⁴

1. *Regionalism*:

Regionalisme diartikan sebagai gabungan dari beberapa negara dalam satu region yang disebut dengan koalisi. Koalisi ini bertindak sebagai aktor bersama dalam hubungan internasional dimana merupakan elemen utama dari pelaksanaan keseimbangan sistemik. Koalisi sangat penting jika harus dihadapkan dengan negara-negara atau koalisi lain yang sifatnya lebih kuat dari koalisi yang bersangkutan. Regionalism mengandung makna *cost reduction operation*. Pelaksanaan *cost reduction* menurut Choy adalah penurunan atau pengurangan tuntutan yang diberikan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah. Terjadinya penurunan atau pengurangan tuntutan disebabkan oleh adanya persamaan persepsi karena situasi mendukung atau *agreements* yang disepakati antara keduanya.

2. *Self-Reliance*:

Pengertian *self-reliance* menurut Choy adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan internal dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak luar. *Self-reliance* merupakan implementasi dari *inward-looking* pembangunan region

⁴³ Tulisan berikutnya akan menggunakan OSRR.

⁴⁴ Chong Li Choy, *Open Self-Reliant Regionalism: Power for ASEAN's Development*, (Singapura, Institute of Southeast Asian Studies, 1981), p.46-51.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

sebagai suatu unit tunggal yang bertindak bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sendiri tersebut. *Self-reliance* terimplikasikan pada tindakan pelaksanaan keseimbangan sistemik, yaitu *withdrawal*. *Withdrawal* adalah usaha penarikan diri dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pihak-pihak luar, tetapi tidak secara total. Tindakan penarikan diri (*withdrawal*) terhadap hubungan eksternal harus diimbangi dengan alternatif untuk mencari dan membina hubungan baru yang lebih menguntungkan. Dengan menurunkan ketergantungan hubungan ekstra regional, maka stabilitas hubungan intra regional dapat terus dijaga.

3. *Openness* :

Openness merupakan kelanjutan dari tindakan *withdrawal*. Dikatakan bahwa walaupun tidak menarik diri secara total, ASEAN selalu mencari alternatif untuk membentuk hubungan baru yang lebih menguntungkan, terutama hubungan dengan negara-negara dengan perekonomian maju. Tindakan inilah yang disebut Choy sebagai tindakan *openness* (keterbukaan). *Openness* mengandung pelaksanaan *cost reduction operation* sebagai suatu bentuk sikap bersahabat dengan negara-negara maju, sehingga ASEAN dapat meminimalisasikan kerugiannya dalam hubungan internasional.

Relevansi OSRR Melalui PCDS Indonesia Dari Perspektif Geostrategis

PCDS melalui diplomasi bilateral (intra-regional) dan multilateral (ekstra-regional) mengakomodir dua *critical points* yang merepresentasikan generalisasi realisasi MEA berdasarkan sudut pandang geostrategis Asia Tenggara yang mencerminkan konsep *regionalism*, *self-reliance* dan *openness* (OSRR).

PROSIDING KONVENASAH IIVI

Relevansi OSRR melalui penggunaan PCDS oleh Indonesia sejatinya merefleksikan posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia dari sudut pandang Geostrategis Asia Tenggara. Sudut pandang geostrategis ini adalah bagian dari pertarungan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok, yang berimplikasi kepada arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara dalam ruang lingkup Asia Pasifik terkait wacana kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Karakteristik regionalisme dari OSRR dalam wacana kemandirian kawasan Asia Tenggara telah ditunjukkan melalui pembentukan *ASEAN Community* dengan pilar MEA-nya, disamping APSC dan ASCC. Koalisi negara-negara ASEAN melalui MEA tersebut disamping bertindak sebagai koalisi aktor dalam hubungan internasional ASEAN, namun juga merupakan bentuk keseimbangan sistemik kawasan. MEA merupakan suatu bentuk pelaksanaan keseimbangan sistemik dari regionalisme ekonomi perdagangan intra-kawasan berhadapan dengan benturan kepentingan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara ini.

Namun benturan kepentingan hegemoni politik keamanan diantara AS dan Tiongkok juga menghasilkan *cost reduction operation* mereka terhadap negara-anggota ASEAN dalam bentuk kawasan ekonomi perdagangan bebas. Dalam hal ini *cost reduction operation* dalam regionalisme terkait MEA dimaknai bahwa negara-negara anggota MEA sejatinyadisamping merupakan bagian dari negara-negara anggota ACFTA, namun mereka juga membuka diri ke dalam keanggotaan RCEP (ASEAN + 6), TPP (Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam), dan IORA (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand). Bagi AS maupun Tiongkok

PROSIDING KONVENASAIHIVI

secara logika akan menurunkan atau mengurangi tuntutan dalam *Cost Reduction Operation*-nya terhadap negara-negara anggota ASEAN, karena adanya persamaan persepsi akan pentingnya perdagangan bebas sebagai tulang punggung kapabilitas ekonomi dan penetrasi pasar bebas mereka di Asia Tenggara.

Namun demikian, baik ACFTA, RCEP, TPP dan IORA pada hakekatnya tetap merupakan produk kepentingan ekonomi politik global Tiongkok dan AS terhadap pemetaan arsitektur ekonomi regional yang mengganggu jalannya kemandirian kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara secara implisit. Produk kepentingan ekonomi politik global tersebut tidak berdiri sendiri. pemetaan arsitektur ekonomi regional di Asia Tenggara juga merupakan konsekuensi logis implikasi rivalitas stabilitas hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok terkait konflik Laut Cina Selatan (LCS)⁴⁵.

Melalui momentum di atas, PCDS Indonesia sebenarnya bermanfaat untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor penting regionalisme (*regionalism*) Asia Tenggara yang tetap berusaha sebagai aktor tunggal untuk memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri (*self-reliance*) dengan meminimalisir ketergantungannya dengan 28 dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan visualisasi lima pilar Indonesia sebagai negara maritim. Namun tetap menjalin keterbukaan (*openness*) akan berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral dalam konteks ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai *buffer state actor* bagi AS dan Tiongkok dalam meluaskan jangkauan *sphere of influence*-nya di Asia Tenggara.

⁴⁵ Penulisan berikutnya akan menggunakan LCS.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

Faktor lain yang menjadikan PCDS Indonesia bermanfaat adalah tidak dapat dipisahkannya posisi strategis Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain pada umumnya yang merepresentasikan rivalitas kepentingan stabilitas hegemoni politik dan ekonomi AS dan Tiongkok di Asia Tenggara dalam konflik LCS. Dalam konflik LCS, implikasi implisit rivalitas stabilitas hegemoni AS dan Tiongkok bertolakdari kepentingan ³⁰ eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas bumi beserta kekayaan alam lainnya. Jalur transportasi pelayaran perdagangan, kebutuhan *off shore* maupun *on shore* yang menyuplai kebutuhan akan ketahanan energi yang membentang sepanjang gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di LCS merupakan pintu masuk strategis yang menghubungkan kedua negara tersebut ke dalam komunitas ekonomi dan perdagangan negara-negara ASEAN. Sehingga dengan demikian jika tidak ditopang dengan strategi politik keamanan yang dikembangkan tiga kekuatan hegemonis (AS-Asia Tenggara-Tiongkok) dalam kawasan LCS, maka akan menjadikan kawasan tersebut menyuburkan persemaian konflik kepentingan politik dan ekonomi yang berimbas kepada negara-negara anggota ASEAN lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa klaim kepemilikan kedaulatan teritorialnya. Politik keamanan yang digunakan Tiongkok dan AS terhadap konflik kawasan LCS lebih mengutamakan pendekatan geostrategis, geopolitik dan geoekonomi terkait dengan *power interest* kedua negara tersebut terhadap kawasan Asia Tenggara. Perspektif geostrategis melalui pendekatan geopolitik dan geoekonomi terhadap LCS sebagai pintu gerbang utama ekonomi perdagangan negara-negara Asia Tenggara membuat sejauh mungkin kemungkinan konflik tersebut berdampak terhadap kemunculan isu-isu strategis keamanan nontradisional,

PROSIDING KONVENASAH IIVI

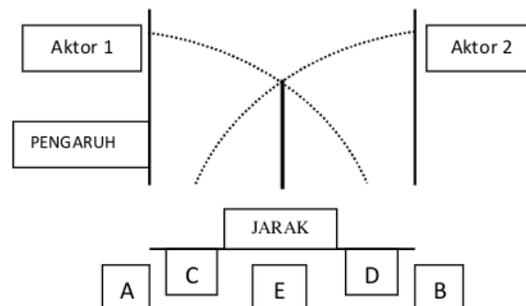
mengingat posisi strategis LCS sebagai jalur penting aktivitas ekonomi perdagangan dunia.

Dalam fungsi konsep *Balance Of Power* (BoP) sebagai *equilibrium*, hubungan antara AS, Asia Tenggara dan Tiongkok terkait Konflik LCS dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1:

Model Ekuilibrium Sederhana

Balance of Power



Keterangan Gambar:

AE : Wilayah Aktor 1 (AS)

BE : Wilayah Aktor 2 (Tiongkok)

CD : Wilayah yang diperebutkan (Asia Tenggara)

PROSIDING KONVENASAH IIVI

Sumber : diolah dari Mas' oed⁴⁶

Model equilibrium BoP di atas menjadikan dasar perimbangan kekuasaan AS dan Tiongkok dalam memandang konflik LCS menjadikan perspektif geopolitik menemukan keberadaan ekuilibrium titik kepentingan/pertimbangan geostrategis AS dan Tiongkok.

³ Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor : dari nasional, internasional, dan benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Di sini geografi membatasi atau mengarahkan aktivitas negara.⁴⁷ ¹⁰ Geo dalam analisis geopolitik terkait dengan struktur ruang (*spatial*). Untuk memahami sistem itu harus dilihat kategori ruang yang strukturnya hirarkis. Dengan demikian memahami analisis geopolitik harus dimulai dengan pendekatan realisme mengingat pembatasan dan pengarahan pada peran negara sebagai unit analisis. Pergerakan unit analisis dalam konteks geopolitik berfungsi untuk melihat bagaimana aktivitas suatu negara berperan dalam arena regional/kawasan jika hal ini diambil sebagai level analisisnya. *Geostrategic realms* membutuhkan konsep *shatterbelt* sebagai *crush zone* atau *shatter zone*. ³ *Shatterbelt* adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi, menjadi wilayah

²³ _____
⁴⁶ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 136.

⁴⁷ Adrianus Harsawaskita, "Great Power Politics Di Asia Tengah: Sudut Pandang Geopolitik", dalam Yulius P. Hermawan (ed.), *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 185. ¹³

PROSDING KONVENASAHIVI

persaingan antara lingkup maritim dan lingkup kontinental. Wilayah *shatterbelt* bukan hanya wilayah penuh konflik, tetapi juga merupakan *playing field* yang seimbang dalam kerangka akses pada dua atau lebih *powers* yang bersaing, yang beroperasi dari *geostrategic realms* yang berbeda. Jadi sebenarnya Shatterbelt adalah tempat bertemunya *sea power state actor* dan *continental power state actor*.

kehadiran dua negara super power bagi kekuatan militer AS dan Tiongkok mengindikasikan dua hirarki tertinggi dari *geostrategic realms*, yaitu maritim (AS) dan Kontinental (Tiongkok). Dengan demikian Asia Tenggara merupakan *Shatterbelt* bagi bertemunya *sea power state actor* (AS) dan *continental power state actor* (Tiongkok).

Sebagai *shatterbelt* AS dan Tiongkok. Asia Tenggara sebagai Kawasan *playing field* dalam konsep BoP adalah kawasan CD (negara-negara Asia Tenggara) yang menjadi medan pertarungan ekuilibrium hegemoni AS dan Tiongkok terhadap kawasan Asia Tenggara (E). Dalam hal ini AS bisa mewakilkan para MNC dan TNC miliknya yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara yang berkepentingan terhadap eksplorasi sumber daya alam yang terkandung di LCS. Bagi Tiongkok, kekayaan sumber daya alam di LCS bisa diolah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestic Tiongkok yang besar akan sumber energi. Oleh karena itu sekalipun pembangunan militer Tiongkok berorientasi *sea (maritime) base*, namun sebenarnya digunakan untuk menunjang pertahanan *continental*-nya. Dan bagi AS, kawasan Asia Tenggara mewakili kepentingan global AS yang semenjak Pemerintahan Obama lebih merapat ke kawasan Asia Pasifik.

Mewakili kepentingan global AS yang mendekati kawasan Asia Pasifik, Presiden Barack Obama dalam *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities For 21st Century* yang dikeluarkan oleh Departemen Of Defense AS yang dirilis pada Januari 2012 menyatakan bahwa:⁴⁸

“We will emphasize our existing alliances, which provide a vital foundation for Asia-Pacific Security. We will also expand our network of cooperation with emerging partner throughout the Asia-Pacific to ensure collective capability and capacity for securing common interests.”

Terkait dengan penilaian AS terhadap kekuatan ekonomi dan militer China yang berada pada titik kulminasi kecemasan AS terhadap pesaing strategisnya ini di kawasan Asia Pasifik, selanjutnya oleh Obama ditegaskan bahwa:⁴⁹

“The Maintenance of peace, stability, the free flow of commerce, and of U.S. influence in this dynamic region will depend in part on an underlying balance of military capability and presence. Over the long term, China’s emergence as a regional power will have the potential to affect the U.S. economy and our security in a variety of ways.”

Berdasarkan pertimbangan kekuasaan AS dan Tiongkok yang digambarkan dalam konsep BoP di atas, maka Indonesia harus memanfaatkan momentum *shatterbelt* tersebut untuk memaksimalkan kapabilitas *power*-nya yang mewakili kepentingan geostrategis region Asia Tenggara. Visi *Maritime State* Indonesia yang notabene berorientasi *sea (maritime) base* merupakan negara penyangga (*buffer state*)

⁴⁸ Barack Obama, “Sustaining U.S. Global Leadership : Priorities for 21st Century Defense”, dalam <http://www.defense.gov>, diakses tanggal 9 Maret 2013.

⁴⁹ Ibid.

PROSDING KONVENASAHIVI

kepentingan hegemoni AS dan Tiongkok di Asia Pasifik. Hal ini sudah ditunjukkan keberadaan AS dan Tiongkok dalam sub regionalisme ekonomi di Asia Pasifik seperti ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Pemanfaatan tersebut mengharuskan Indonesia melalui PCDS setiap saat mereposisi peran strategisnya dalam geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara sebagai kawasan berkarakteristik OSRR. Oleh karena itu, di luar keanggotaannya dalam ACFTA, maka diplomasi paralel Indonesia berupa bilateral dan multilateral perlu dijalankan secara intensif oleh Indonesia dalam kerangka RECP, TPP dan IORA. Perkembangan aktual terkait hal tersebut di atas adalah hasil kunjungan bilateral Presiden Jokowi ke AS beberapa waktu yang lalu. Di samping diputuskan Indonesia akan bergabung dengan TPP, hasil kunjungan bilateral Presiden Jokowi tersebut juga menyepakati 12 kesepakatan bisnis di bidang energi, transportasi dan perluasan pabrik. Total nilai kesepakatan bisnis yang disetujui mencapai US\$ 20,075 miliar (sekitar 274 triliun). Kesemuannya dalam bentuk investasi langsung (FDI) dan investasi keluar (*outward investment*). Menurut BKPM, realisasi investasi AS di Indonesia periode Januari-September 2015 sebesar US\$ 854 juta. Total Investasi AS periode 2010-September 2015 sebesar US\$ 8 miliar, menduduki peringkat ketiga setelah Singapura dan Jepang.)⁵⁰.

Kuntjoro-Jakti menggambarkan reposisi peran strategis suatu negara-bangsa sebagai suatu pemahaman atas posisi strategis dari lokasi dan wujud geografi suatu negara-bangsa di permukaan bumi. Dalam pandangannya suatu pemahaman atas posisi strategis dari lokasi dan wujud geografi suatu negara-bangsa di permukaan bumi baik pada dimensi darat, laut, maupun dimensi udaranya, pada akhirnya akan

⁵⁰ Koran Tempo, 28 Oktober 2015.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

memunculkan perumusan geostrategik. Selanjutnya, berlandaskan pemahaman geostrategik tersebut akan diturunkan perumusan dari geopolitik, lalu dari geoekonomi. Dapat dipahami bahwa geopolitik adalah perumusan utama dari postur politik luar negeri suatu negara-bangsa yang dikaitkan kepada pemahaman tentang posisi strategis geografis suatu negara. Sedangkan geoekonomi adalah perumusan postur strategis dari hubungan-hubungan ekonomi dengan pihak luar dari suatu negara, yang juga dikaitkan kepada unsur-unsur geografis yang berperan penting pada kehidupan suatu negara-misalnya dalam hal kekayaan alam, keberadaan ALKI, bentangan wilayah udara, dan lainnya.⁵¹

Penggambaran reposisi peran strategis negara-bangsa seperti yang dijelaskan oleh Kuntjoro-jakti di atas semakin menegaskan relevansi PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi paralel Indonesia dalam mengambil keuntungan *positioning* Indonesia sebagai bagian dari komunitas ekonomi Asia Tenggara. Keuntungan *positioning* yang berefek *outward looking* orientation politik luar negeri Indonesia ke dalam instrumen diplomasi ekonomi. Keuntungan *positioning* yang mengharuskan Indonesia harus selalu mereposisi peran strategisnya dalam percaturan ekonomi politik Asia pasifik. Hal ini perlu dilakukan karena walau bagaimanapun juga Indonesia harus tetap fokus kepada MEA yang diorientasikan pada kemandirian kawasan ekonomi Asia Tenggara. PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi yang bersifat paralel bagi Indonesia sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir kerugian ekonominya dalam arena ekonomi perdagangan internasional secara komprehensif.

⁵¹Dorodjatun Koentjoro-Jakti, *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm.53.

PROSIDING KONVENASAH IIVI

PCDS berusaha menyeimbangkan kepentingan relasi ekonomi bilateral dan multilateral sebagai suatu bentuk simbiosis mutualisma diplomasi ekonomi Indonesia.

Perkembangan terakhir yang menunjukkan Indonesia akan bergabung dengan TPP mengindikasikan pentingnya urgensi penguatan PCDS untuk merealisasikan secara bertahap lima pilar pencapaian visi negara-bangsa maritim. Namun perlu diwaspadai juga berbagai efek politik dan ekonomi dari bergabungnya Indonesia ke dalam TPP, dimana pada momen yang sama harus fokus dengan implementasi perjalanan MEA berikutnya. Hal ini juga sama berlakunya dengan regionalisme ekonomi lain di luar MEA seperti ACFTA, RCEP dan IORA, yang melibatkan stabilitas hegemoni kepentingan AS dan Tiongkok dalam menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai *playing field* mereka. Sebagai *playing field* yang menempatkan ASEAN sebagai *buffer actor* AS dan Tiongkok dalam model equilibrium BoP di Asia Pasifik.

⁷ Ruang lingkup dan implikasi TPP sangat luas serta melampaui persoalan perluasan akses pasar. ¹ Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan lain yang selama ini sepenuhnya merupakan urusan domestik suatu negara. Selain itu, proses perundingan TPP juga sangat didominasi oleh kepentingan Amerika Serikat. Proses tersebut terpisah dan bukan merupakan bagian dari upaya penguatan masyarakat ekonomi ASEAN/MEA yang saat ini menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia. Pembentukan TPP tak serta merta menjadikan perdagangan di kawasan Asia pasifik akan menjadi lebih “bebas”. Justru sebaliknya, TPP telah menerapkan aturan tentang

PROSIDING KONVENASAIHIVI

akses pasar yang lebih kompleks dan sulit untuk dipenuhi oleh produk dan jasa dari Indonesia. Akibatnya, berdasarkan pengalaman implementasi perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, banyak pihak justru mengkhawatirkan keikutsertaan Indonesia pada TPP hanya akan menjadikan Indonesia “pasar” bagi produk dan jasa dari negara lain. Di samping itu, sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksekutif dibandingkan dengan komitmen dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) ataupun perjanjian perdagangan bebas lain. Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis⁷ sebagaimana diberikan oleh WTO atau perjanjian perdagangan bebas lainnya (misalnya kebijakan mengenai kebijakan perpajakan dan pengaturan khusus tentang barang-barang yang sensitif) dihapuskan.⁵² Hak negara¹⁶ dalam rangka melindungi kepentingan nasional merupakan faktor terpenting yang harus ditekankan di sini. Sebagai contoh yang paling sulit nanti adalah perubahan di dalam negeri karena ada sejumlah ketentuan TPP yang harus diterapkan. Ketentuan itu, misalnya pengurangan hak-hak eksklusif badan usaha milik negara (BUMN).⁵³

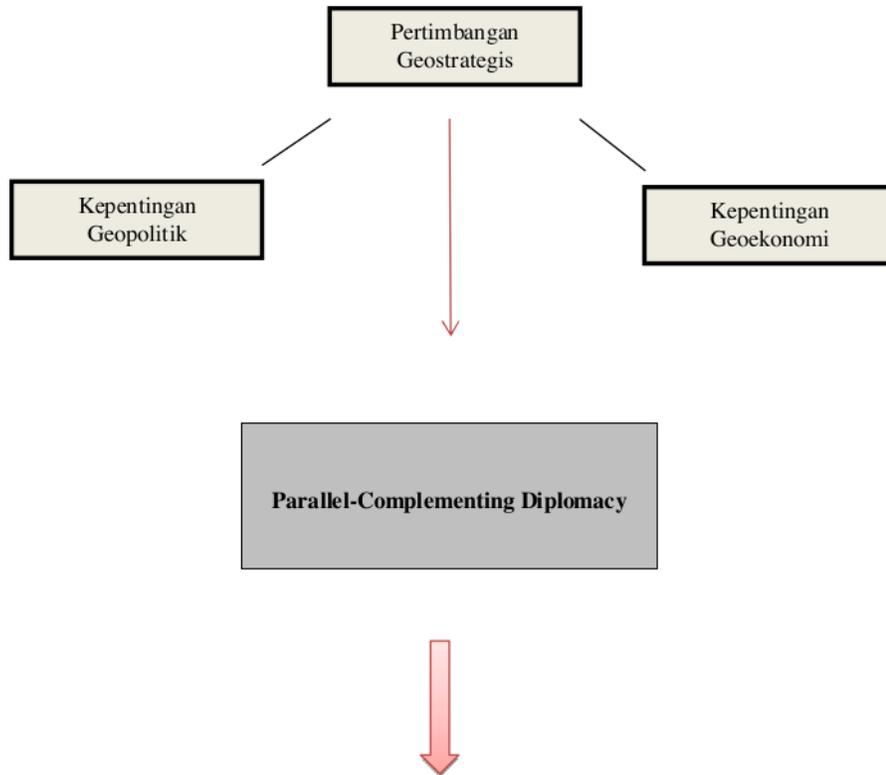
Secara garis besar bagan alur pertimbangan dan kepentingan penggunaan PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi paralel Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini:

16

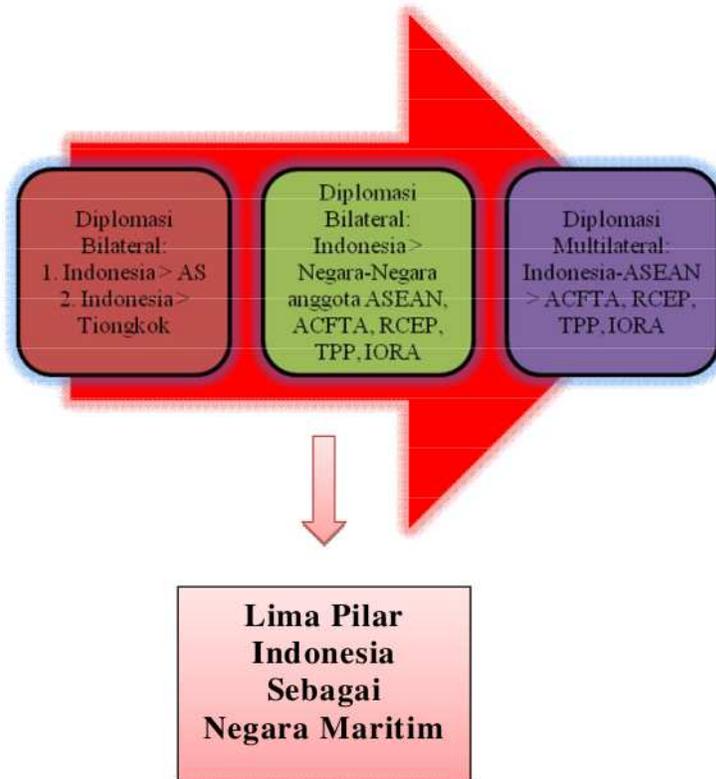
⁵² Abdulkadir Jailani, *Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik*, (Kompas, 15 Oktober 2015).

⁵³ Kompas, 29 Oktober 2015.

Gambar 2:
Alur Pertimbangan dan Kepentingan
Penggunaan PCDS



PROSIDING KONVENASAH IIVI



Kesimpulan

PCDS sejatinya merupakan strategi global diplomasi ekonomi Indonesia yang dilaksanakan melalui dua jalur diplomasi: diplomasi bilateral dan multilateral secara simultan. Dikatakan global karena lebih dari sekedar merepresentasikan kepentingan regional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. PCDS mencerminkan relevansi pemikiran OSRR akan berbagai tindakan Indonesia nantinya ke dalam konsep *regionalism*, *self-reliance* dan *openness* di kawasan Asia Pasifik.

Dengan demikian PCDS diperlukan Indonesia untuk memperkuat peran geostrategisnya yang melalui MEA, maka langkah berikutnya adalah mereposisi

PROSIDING KONVENASAH IIVI

peran geostrategis tersebut ke dalam arena pergumulan regionalisme lain di lingkup Asia Pasifik yang meliputi ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Dalam frame keempatnya tersebut, diplomasi bilateral terhadap negara-negara anggota keempat rezim ekonomi dan perdagangan bebas di atas perlu dimaksimalkan dalam rangka menyeimbangkan diplomasi multilateral Indonesia dalam konteks ASEAN. Hal inilah yang memungkinkan Indonesia dalam MEA, diharapkan nantinya selalu mereposisi peran strategisnya terhadap kepentingan geopolitik dan geoekonomi sebagai bagian dari pertimbangan geostrategis AS dan Tiongkok secara keseluruhan di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia dan Asia Tenggara secara implisit mengisyaratkan sebuah *buffer zone* yang berfungsi sebagai *playing field region*, yang mana menghubungkan kepentingan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok melalui ekspansi global kepentingan ekonomi dan perdagangan bebas/terbuka mereka. Dalam model equilibrium BoP, dalam pandangan penulis negara-negara ASEAN khususnya Indonesia adalah kawasan *shatterbelt*, yang menjadisetelit *sphere of influence* bagi keberhasilan AS dan Tiongkok. Keberhasilan yang dimaksud adalah dalam menanamkan stabilitas hegemoni politik keamanan mereka dengan memanfaatkan isu konflik LCS demi keuntungan ekonomi politik mereka dalam memberikan pengaruh hegemonis kawasan Asia Tenggara. Untuk itu PCDS berfungsi untuk memberikan payung keamanan diplomasi dalam memberikan manfaat Indonesia untuk meminimalisir kerugiannya dalam arena global ekonomi dan perdagangan bebas terkait *cost reduction operations* yang dilakukan oleh negara-negara kuat, dalam hal ini adalah AS dan Tiongkok.

Mataram. 24 – 28 November 2015

PROSIDING KONVENASAH IIVI

PCDS juga menjustifikasikan nantinya mengenai visi lima pilar negara maritim Indonesia. Sebagai *starting point of departure*, PCDS sejatinya merupakan *grand strategy* diplomasi ekonomi Indonesia yang membangun keseimbangan sistemik kepentingan domestik, regional dan internasional Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsi aktor utama negara ASEAN. Terminal terakhir PCDS dalam memfungsikan keseimbangan sistemik ini adalah ¹⁷ mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik sebagai negara-bangsa maritim, bermandiri secara ekonomi sebagai negara-bangsa maritim, dan tentunya sebagai negara-bangsa yang berkebudayaan maritim. Ketiganya adalah realisasi dari lima pilar ³² Indonesia sebagai negara maritim melalui ¹¹ karakter budaya maritim, membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dengandemikianpadaakhirnya Indonesia merupakan bagian penting dari regionalisme region Asia Tenggara yang merupakan aktor tunggal untuk memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri dengan meminimalisir ketergantungannya dengan negara-negara/kawasan lain. Pada saat yang sama juga menjaga interkoneksi keterbukaan akan berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral. Dan tentunya dalam rangka menjaga interkoneksi keterbukaan inilah maka berbagai hasil riset, seminar kajian maupun *call for paper* terkait perkembangan MEA menjadi signifikan untuk *critical reviews* terhadap kemunculan beragam dinamika isu ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu penulis sekaligus menghaturkan

PROSDING KONVENASAHIVI

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis, sehingga makalah ini bias diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan.

Mataram. 24 – 28 November 2015

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Harsawaskita, Adrianus. 2007. "Great Power Politics Di Asia Tengah : Sudut Pandang Geopolitik". Dalam Yulius P.Hermawan (ed.). *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*, hlm. 184-210. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Koentjoro-Jakti, Dorodjatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Li Choy, Chong. 1981. *Open Self-Reliant Regionalism: Power For ASEAN's Development*. Singapura: ISEAS.

Mas' oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.

Jurnal:

Hidayat, R.A. 2014. "Parallel-Complementing Diplomacy Sebagai Strategi Politik Keamanan ASEAN Dalam *ASEAN Political-Security (APSC) 2015*". *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Al Azhar*, Vol.V, No.1, Juni 2014: 19-36.

Sumber Elektronik:

Metrotvnews, "Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia". Melalui <www.ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia>[15 Oktober 2015].

PROSIDING KONVENASAIHIVI

Obama, Barrack. "Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense". Melalui <www.defense.gov>[09/03/13].

Sumber Berkala:

Jailani, Abulkadir. 2015. *Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik*.
Harian Kompas, 29 Oktober 2015.

Harian Kompas, 29 Oktober 2015.

Koran Tempo, 28 Oktober 2015.

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arisheruutomo.com Internet Source	3%
2	repository.its.ac.id Internet Source	2%
3	nanopdf.com Internet Source	1%
4	bpiw.pu.go.id Internet Source	1%
5	darkwin98.wordpress.com Internet Source	1%
6	jalursutrachina.blogspot.com Internet Source	1%
7	boxilmu.blogspot.com Internet Source	1%
8	berkas.dpr.go.id Internet Source	1%
9	hafizmuhammad-nashr.blogspot.com Internet Source	1%

10	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
11	roboguru.ruangguru.com Internet Source	<1 %
12	ejournal.lipi.go.id Internet Source	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	cendekia.unisza.edu.my Internet Source	<1 %
15	apps.dtic.mil Internet Source	<1 %
16	kadirjailani.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	vdocuments.site Internet Source	<1 %
18	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
19	ebook3d.pddi.lipi.go.id Internet Source	<1 %
20	fni-statistics.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %

22	opac.peradaban.ac.id Internet Source	<1 %
23	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.fkpmar.org Internet Source	<1 %
25	id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	pks-solo.or.id Internet Source	<1 %
27	rajatrepik.com Internet Source	<1 %
28	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
29	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
30	military-info.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	setnas-asean.id Internet Source	<1 %
32	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26
